

RINGKASAN

Upaya untuk mengembangkan ekonomi di kawasan Teluk Tomini sebagai unggulan yang berbasis pedesaan perlu dukungan berbagai aspek yang salah satu dukungan penting adalah terdapatnya peta data dasar atau data baseline kondisi secara komprehensif tentang kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, dan hukum serta tata kelola di kawasan Teluk Tomini. Penelitian ini didasari pada belum tersedianya potret data kondisi sosial ekonomi sebagai arsip bank data bagi Universitas Negeri Gorontalo. Tidak adanya pemetaan data menjadi hambatan bagi para akademisi dalam melakukan kajian terapan dan pengembangan dalam rangka melahirkan solusi untuk mengembangkan ekonomi pedesaan di kawasan Teluk Tomini. Seperti contoh data kondisi persentase kemiskinan, indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan, proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan, stunting, pendapatan pemerintah, rasio penerimaan pajak, dan program-program kegiatan kerja sama di setiap kabupaten/kota di kawasan Teluk Tomini berbasis SDGs belum memiliki kajian yang mendalam baik kondisi *existing* maupun proyeksinya. Kendati data ini jika dimiliki secara ilmiah dan terpetakan kondisinya *existing* termasuk proyeksi kecenderungan pencapaian target SDGs, maka akan diperoleh gambaran strategi dan program inovasi prioritas yang perlu dikembangkan di kawasan Teluk Tomini sesuai karakter daerah yang diperoleh dari data *baseline* tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan dan memproyeksi data kondisi pilar SDGs khususnya pilar ekonomi pada goals 7 dan goals 17 di kawasan Teluk Tomini. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data utama berupa data sekunder yang terpublikasi terutama dari Badan Pusat Statistik (BPS). teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik statistik sederhana, seperti rata-rata, rasio capaian, regresi linear, dan proyeksi sederhana yang menggunakan aplikasi excell. Selanjutnya, penentuan ketercapaian target TPB/SDGs dilakukan dengan cara membandingkan hasil proyeksi indikator TPB/SDGs dengan target global maupun target yang berdasarkan Perpres No. 59 Tahun 2017. Metode analisis proyeksi menggunakan proyeksi *logaritmik*, *exponensial*, dan *linear*.

Hasil penelitian menemukan bahwa dari total 16 indikator yang diteliti, hanya 5 indikator yang dapat diidentifikasi dan dilakukan proyeksi. Pada indikator 7.1.1* rasio elektrifikasi terdapat empat Kabupaten/Kota dan tiga Provinsi yang tersedia data. Dari data yang telah diolah, disimpulkan bahwa Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Sulawesi Tengah diprediksi dapat mencapai 100% baik target global maupun target PERPRESS Nomor 11 Tahun 2020. Sedangkan Kabupaten Parigi Moutong hanya mencapai 93,54%. Rendahnya capaian Kabupaten Parigi Moutong disebabkan kurangnya data yang tersedia, sehingga ada keterbatasan dalam melakukan proyeksi. Namun secara overall, masyarakat di tiga Provinsi di wilayah Teluk Tomini telah mendapatkan akses untuk suplai listrik baik dari PLN maupun non-PLN.

Pada indikator 7.2.1(b) rasio penggunaan gas rumah tangga, ditemukan bahwa penggunaan gas rumah tangga tahun 2017 – 2021 di tiga Provinsi tersebut juga

mengalami kenaikan selama kurun waktu lima tahun terakhir. Provinsi Gorontalo memiliki rasio tertinggi dengan capaian sebesar 90,80%, urutan kedua adalah Provinsi Sulawesi Utara sebesar 80,94%. Sedangkan Provinsi Sulawesi Tengah, capaian rasio penggunaan gas rumah tangga masih tergolong rendah di antara tiga wilayah di kawasan teluk tomini dengan capaian sebesar 68,96% namun diprediksi akan mencapai 100%.

Pada indikator 17.1.1* total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB, ditemukan bahwa empat wilayah yakni Kabupaten Boalemo, Bone Bolango, Bolaangmongondow Selatan, dan Tojo Una Una berada pada kategori A, dua wilayah yakni Kabupaten Pohuwato dan Poso berada pada kategori B, dan sisanya lima wilayah yakni Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Bolaangmongondow Timur, Banggai, dan Parigi Moutong berada pada kategori D. Sementara pada indikator 17.1.1(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB, seluruh wilayah yang diteliti berada pada kategori D. Ini berarti sumber pendapatan pemerintah masih sangat bergantung pada pendapatan transfer. Sedangkan pada indikator 17.1.2* proporsi belanja daerah yang didanai oleh pajak, wilayah Kabupaten Gorontalo, Boalemo, Pohuwato, Bone Bolango, Bolaangmongondow Timur, Banggai, dan Poso ada pada kategori A. Sedangkan Kota Gorontalo, Bolaangmongondow Selatan, Tojo Una-Una, dan Parigi Moutong masuk pada kategori D.